

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 147 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2020 TENTANG TIM
NARAHUBUNG REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pembaruan daftar Tim Narahubung Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan, sehingga diperlukan penyempurnaan terhadap daftar nama Tim Narahubung Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 96 Tahun 2020 tentang Tim Narahubung Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2020 TENTANG TIM NARAHUBUNG REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 96 Tahun 2020 tentang Tim Narahubung Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR
96 TAHUN 2020 TENTANG TIM
NARAHUBUNG REFORMASI
BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 147 TAHUN 2020

TANGGAL : 9 JULI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM NARAHUBUNG REFORMASI BIROKRASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Organisasi	Honorarium	
Pengarah	Roni Dwi Susanto	Kepala LKPP	750.000	
Ketua	Gusmelinda Rahmi	Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana	650.000	
Anggota				
	1.	Mutiara Karina	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana	500.000
	2.	Cecep Sutisna		500.000
	3.	Deddy Andrianto	Biro Umum dan Keuangan	500.000
	4.	Angky Dwi Seffyanto	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	500.000
	5.	Indra Lesmana		500.000
	6.	Estu Retno Yuliaty	Inspektorat	500.000
	7.	Budi Bowo Laksono	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	500.000
	8.	Yoga Nurdani		500.000
	9.	Eva Sinaga	Direktorat Pengembangan Strategi	500.000

10.	Yasmine Permata Sari	dan Kebijakan Pengadaan Umum	500.000
11.	Rizki Arif Sudrajat	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	500.000
12.	Meylina Putri Fabisari	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	500.000
13.	Muhamad Yusuf Chandra Nugraha	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	500.000
14.	Frans Yoenero		500.000
15.	Sri Utaminingsih	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog	500.000
16.	Dissa Patricia	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	500.000
17.	Kemala De Kristie	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	500.000
18.	Galuh Arini Sasi Kirono		500.000
19.	Agung Ismail	Direktorat Sertifikasi Profesi	500.000
20.	Dian Arsita Wardhani	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat	500.000
21.	Eben Henry Reagen	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	500.000
22.	M. Taufikurrohman	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR
96 TAHUN 2020 TENTANG TIM
NARAHUBUNG REFORMASI
BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 147 TAHUN 2020

TANGGAL : 9 JULI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN AGEN PERUBAHAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Nama	Unit Organisasi
1.	Donald Sutanto Panjaitan	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
2.	M. Adiwibowo Soedarmo	Biro Umum dan Keuangan
3.	Miftah Irfaniah	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
4.	Estu Retno Yulianti	Inspektorat
5.	Arif Rachman	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
6.	Zulhenny	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
7.	Yuyu Yulianti	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
8.	Theodore Sutarto	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional

9.	Mustika Rosalina Putri	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
10.	Eko Rinaldo Octavianus	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
11.	Ichwan Makmur Nasution	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
12.	Ria Agustina Nasution	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
13.	Windy Dian Trisari	Direktorat Sertifikasi Profesi
14.	Selamet Budiharto	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
15.	Harry Sri Kahartan	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
16.	Arif Budiman	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO